

The Role of Indonesia's Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) as Financial Intelligence Unit (FIU) in Preventing Money Laundering in Compliance with FATF Recommendations

Author:

Naurah Raniah¹ and Diantika Rindam Floranti²

ABSTRACT

This legal research analyzes the role of the Financial Transaction Reports and Analysis Center/*Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan* as Indonesia's Financial Intelligence Unit (FIU) in preventing money laundering crimes, particularly in relations to its compliance with the Financial Action Task Force (FATF) recommendations.

This legal research will be conducted using a normative-epirical approach. By combining a literature review and field approach, this method enables a comprehensive analysis. The data for this research will be obtained through interviews with analysts from the Directorate of Law and Regulation at PPATK.

This research concludes that while PPATK as FIU carries out the function of preventing money laundering, there are still challenges including regulatory adjustments, weak inter-agency coordination, and the use of virtual assets. Although PPATK has mostly complied with FATF recommendations, improvements in law enforcement, inter-agency collaboration, and technical adaptation are still needed to strengthen prevention of money laundering.

Keywords: FIU, PPATK, Money Laundering, FATF Recommendations, Anti-Money Laundering

¹ Student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2021).

² Lecturer at the Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Sesuai dengan Rekomendasi FATF

Penulis:

Naurah Raniah¹ and Diantika Rindam Floranti²

INTISARI

Penelitian hukum ini menganalisis peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Unit Inteligen Keuangan/Financial Intelligence Unit (FIU) Indonesia, dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang, khususnya terkait kesesuaiannya dengan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF)

Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris. Dengan menggabungkan tinjauan pustaka dan pendekatan lapangan, metode ini memungkinkan analisis yang komperhensif. Data untuk penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara dengan analis dari Direktorat Hukum dan Regulasi di PPATK.

Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa PPATK dalam menjalankan fungsi pencegahan pencucian uang, masih terdapat tantangan seperti penyesuaian regulasi, lemahnya koordinasi dan maraknya penggunaan aset virtual. Meski PPATK telah memenuhi rekomendasi FATF secara garis besar, peningkatan dalam penegakan hukum, kolaborasi antar lembaga, dan adaptasi teknologi masih diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan pencucian uang.

Kata Kunci: FIU, PPATK, Pencucian Uang, Rekomendasi FATF, Anti-Pencucian Uang

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2021).

² Dosen Departemen hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.